



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2026 INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

**Pemerintah Kabupaten Tegal
Inspektorat**

Jl Ahmad Yani No 173 Slawi

www.inspektorat.tegalkab.go.id

email :inspektorat@tegalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2026 telah selesai disusun sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4)”.

Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal merupakan dokumen Perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Tahun 2025-2026 Inspektorat Kabupaten Tegal dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Tegal selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja berkat partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Tegal, dan besar harapan kami agar RENJA ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Tegal dan yang memerlukannya, guna dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan.

Slawi, 06 Januari 2025

Inspektur,



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	31
2.4 Review Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat.....	52
BAB III TUJUAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	53
3.1 Telaah Kebijakan Nasional.....	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	56
3.3 Program dan Kegiatan	61
BAB IV RENCANA KERJA.....	61
BAB V PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tegal.....	9
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal.....	27
Tabel T-C.31 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026.....	36
Tabel Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tegal	61
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiran Maju Tahun 2027.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Inspektorat Kabupaten Tegal merupakan perangkat daerah yang berperan sebagai unsur penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang pengawasan. Untuk memberikan arah yang jelas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk program dan kegiatan selama rentang waktu 1 (satu) tahun mendatang, Inspektorat Kabupaten Tegal telah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2026.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2026 telah disesuaikan dan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya adalah : (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan (d) Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tegal. Berbagai regulasi tersebut menjadi arahan dalam merumuskan rencana strategis yang sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat, tata cara menyusun perencanaan, dan panduan untuk mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan pembangunan.

Renstra Inspektorat Tahun 2025-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 sebagai pedoman dalam implementasi setiap tahunnya diejawantahkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tegal, yaitu sebuah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2026, tentu didalamnya tersaji program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan maka perlu perencanaan kerja yang efektif dan efisien dalam skala Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2026 berpedoman pada Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dan mendasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, yang telah disesuaikan dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja BPKP Tahun 2026 dilakukan dalam tahapan penyusunan Rancangan Awal Renja untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

- e. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomer 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-20

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana Inspektorat Kabupaten Tegal tahun 2026 dalam bentuk program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, berikut pendanaan indikatif tahun berkenaan dan prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Tegal yang mengarah pada kontribusi pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Inspektorat Kabupaten Tegal untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Terdapat pedoman untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. EVALUASI CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
- 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
- 2.4. REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5. PENELAAHAN USULAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA

BAB V PENUTUP

- 5.1. CATATAN PENTING
- 5.2. KAIDAH PELAKSANAAN
- 5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun Lalu

Secara umum Inspektorat Kabupaten Tegal telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa..

Pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Tegal telah melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang diejawantahkan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dan Kegiatan Pendampingi dan Asistensi;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, yang merupakan program penunjang 2 (dua) program utama, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Tahun 2024 Inspektorat mendapatkan alokasi anggaran setelah perubahan sejumlah Rp.14.522.285.102 dengan realisasi anggaran Rp11.631.275.915,- mencapai 80.09%.

Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2024 belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) program dan memiliki 11 (sebelas) kegiatan dengan masing-masing indikator dengan capaian dari masing-masing indikator seperti pada tabel T-C.29 sebagai berikut:

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Progra m (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2022- 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)											
6	0	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan		1	1	1	1	100		100	100
6	0	02	2,01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan		14	30	14	34	100		100	100
6	0	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan		6	48	6	48	100		100	100
6	0	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan									
6	0	02	2,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan	Kasus	48	41	44	44	92		92	92
6	0	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										
						Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	Persen	12.5	8.3	12.5	12.5	100		100	100
						Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	Persen	90	90	90	93.15	100		93.15	100
						Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	Persen	100	95	90	100	100		100	100
6	0	03	2,01		Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawas-an & Fasilitasi pengawas-an	Jmlh kebijakan teknis									
6	0	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijaksan Pengawasan (JAKWAS) Tersusunnya PKPT	Dokum en	1	1	1	1	100		1	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	0	03	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya TPTGR	dokumen	1	1	1	1	100		1	100
6	0	03	2,02		Pendampingan & Asistensi	Terlayannya permintaan pendampingan & Asistensi	OPD	48							
6	0	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pendampingan	OPD	48	48	48	48	100		100	100
6	0	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya PD rintisan WBK/WBBM	OPD	48	48	48	48	100		100	100
6	0	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persebatse capaian MCP	Persen	90	85.25	90	94.31	100		94.31	100
6	0	03	2,02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Hasil Survey	OPD	15	48	15	15	100		15	100
6	0	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah		Persen	100	100	100	100	100		100	100
6	0	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen, Jumlah Pameran	dokumen	1 dok 2 pamera	1		11	20	100	20	100
6	0	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Riview Renstra	Dokumen, pamera	1 2	1 2	5	5	100		5	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2022- 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							n								
6	0	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah dokumen LKJIP,LPPD, LKPJ/AMJ	dokumen	1	1	6	15	100%		6	100
6	0	01	2,02		Administra-si Keuang-an Perang-kat Daerah										
6	0	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12	12	12	49	49		49	100
6	0	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jmlh dokumen laporan keuangan	Dokum	12	12	1	1	100		1	100
6	0	01	2,05		Administra-si Kepega-waian Per-angkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat									
6	0	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Orang	40	40	59	49	100		100	100
6	0	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
6	0	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Jenis	9	9	9	9	100		9	100
6	0	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK	Item	31	31	31	31	100		31	100
6	0	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis kebutuhan peralatan RT	Jenis	22	22	22	22	100		22	100
6	0	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlh kebutuhan mamin pegawai	Bulan	11	11	11	11	100		1192	92

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024
6	0	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Kebutuhan Cetak ganda	Jenis	5	4	5	5	100	5	100
6	0	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jmlh Kebutuhan Surat Kabar	exsemp lar	180	180	180	180	100	180	100
6	0	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat & koord DD & LD	Kali	30	30	30	30	100	100	100
6	0	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
6	0	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan mobil dinas lapangan	unit	25	4	2	2	100	8	8
6	0	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis kebutuhan peralatan	Unit	43	79	82	108	100	108	100
6	0	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasarana kantor(interior, tempat parkir,penataan lingkungan, ruang rapat irban)	Gedun g	3	2	2	2	100	2	100
6	0	01	2,08		Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe-merintah Daerah									
6	0	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jmlh Surat Terkirim	surat	3000		3000	2700	90	2700	90
6	0	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jmlh rek Listrik, Air, Internet dan Telpon	bulan	12	12	12	12	95	95	100
6	0	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai OS	Orang	7	5	7	7	100	7	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	0	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
6	0	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis kendaraan yang dipelihara	Unit	24	29	24	24	100		24	100
6	0	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC Terpeliharanya Laptop/PC Terpeliharanya Printer	Unit	101	79	101	101	100		100	100
6	0	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dipelihara	Gedung	2	2	2	2	2		2	100

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tegal

**Nama Perangkat Daerah : Inspektorat
(Indikator Renstra 2025-2026)**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Realisas i Capaian Progra m dan Kegiata n s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=(11/5)
Urusan Pengawasan Pemerintahan										
Bidang Urusan Inspektorat Daerah										
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Persen	93					92.50		93
	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel	Persen	90					80		90
	Persentase Desa Menyajikan Laporan Keuangan secara Akuntabel	Persen	20					15		20
	Persentase Pengawasan		90					80		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi i Capaian Progra m dan Kegiata n s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kinerja Pemerintah Daerah									
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI		-	91.56	92	92.28	100	-	92.28	100
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi		-	60	100	100	100	-	100	100
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten		-	71.25	80	45.27	56.59	-	45.27	56.59
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	<i>Laporan</i>	213		96	213	100	213	100	100
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	59	17	10	13	100	59	100	100
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	50	61	46	76	100	50	100	100
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	16	41	19	41	100	16	100	100
Reviu Laporan Keuangan		laporan	-	1	1	1	100	-	100	100

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi i Capaian Progra m dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa		84 (50 P3D, 34 AKD)	30	14	34	100	84 (50 P3D, 34 AKD)	100	100
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	48	6	48	100	4	100	100
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan tertentu	<i>Persen</i>	85		48	44	92	85	44	92
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penanganan pengaduan dan TPTGR	<i>laporan</i>	28	41	48	44	92	28	44	92
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi	Persen	100					100		
	Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	Persen	-	8.3	12.5	12.5	100		12.5	100
	Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	Persen	-	90	80	80	80	-	80	80
	Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	Persen	-	95	90	90	90	-	90	90

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi i Capaian Progra m dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawas-an & Fasilitasi pengawas-an	Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persen	100					100		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan	Rekomen dasi	2	1	1	1	100	2	1	100
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	rekomend asi	1	1	1	1	100	1	1	100
Pendampingan & Asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi	Persen	100					100		
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	OPD	48	48	48	48	100	48	100	100
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	13	48	48	48	100	13	100	100

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi i Capaian Progra m dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persen		82	90	89.45	99		99	99
	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	29					29		
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	OPD	48	48	48	48	100		100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persen	100	100				100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evauasi Kinerja PD	Persen	100	100				100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	11	1 2	1 2	1 2	100	11	100	100

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi i Capaian Progra m dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	15	1	1	1	100%	15	100	100
Administra-si Keuang-an Perang-kat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100					100		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	ASN	58	49	49	49	100	58	49	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verfikasi keuangan	dokumen	12	12	12	12	100	12	12	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100					100		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	50	49	49	49	100	50	100	100

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi i Capaian Progra m dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100					100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1	9	9	9	100	1	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	31	31	34	100	1	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket perlatan rumah tangga	Paket	1	22	22	23	100	1	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Paket	1	11	11	11	92	1	92	92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang yang di cetak dan jumlah lembar penggandaan	Paket	1	4	4	4	100	1	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan	Dokumen	12	180	180	180	100	12	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	60	30	30	30	90	60	100	100

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi i Capaian Progra m dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100					100		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	unit	10	4	2	2	100	10	8	8
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	79	108	108	100	1	100	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit kendaraan Dinas yang disediakan	Unit	-	2	2	2	1	4	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12		3000	2700	90	12	90	90
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	laporan	12	12	12	12	95	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor	laporan	12	5	7	7	100	12	100	100

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025	Realisasi i Capaian Progra m dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentas e	100					100		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	29	29	24	24	100	29	100	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	90	79	101	101	100	90	100	100
Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2

Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2024 secara keseluruhan tercapai 95.50%, masih ada beberapa program /kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- a. Kebijakan pengawasan terkait dengan fokus pemeriksaan dari tahun ke tahun cenderung terus berubah, sehingga dapat mempengaruhi lambatnya pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- b. Secara kuantitas SDM APIP terus mengalami penyusutan karena purna tugas, sementara hingga saat ini belum ada penambahan. Sebagai konsekuensinya akan menambah beban tugas SDM APIP, sangat berdampak pada pelaksanaan kegiatan di pengawasan;
- c. Mandatory tugas pengawasan dengan jumlah obyek pengawasan yang bertambah dan sarat dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi;
- d. Sistem Aplikasi yang belum terintergrasi antara perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan.

Untuk menjamin keberhasilan kinerja 2024 maka rencana tindak lanjut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Keberadaan APIP harus dapat memberikan nilai tambah bagi upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Kesiapan SDM APIP yang adaptif dan responsive melalui penguatan kapasitas SDM;
- c. Dukungan dan respon entitas untuk menyelesaikan tindak lanjut atas hasil pengawasan;
- d. Perlu adanya strategi perencanaan, dan pelaksanaan program/kegiatan yang tepat, efektif dan efisien;
- e. Sistem Informasi yang terintegrasi sehingga pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Tegal dalam rangka terlaksananya tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.590.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.321.162.671,- atau 51.01% dengan realisasi kegiatan berupa:

- (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

Pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa. Mengingat terbatasnya SDM, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sehingga pelaksanaan pengawasan berfokus pada pendampingan, asistensi, monitoring dan evaluasi serta reuiu, termasuk monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan monitoring dan evaluasi implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

Pada tahun 2024 Jumlah informasi potensi Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara atau Daerah (PWKKND) yang diterima sampai dengan Semester II bulan Desember tahun 2024 sejumlah 57 (lima puluh tujuh) dengan rincian 44 (empat puluh empat) informasi potensi PWKKND sudah dilakukan penelaahan dan 13 (tiga belas) informasi PWKKND belum dilakukan penelaahan, dengan simpulan 26 (dua puluh enam) informasi potensi PWKKND perlu dilakukan Pengawasan untuk Tujuan Tertentu (PUTT) dan sampai dengan dilaksanakan supervisi telah diselesaikan 21 (dua puluh satu) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan perhitungan jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.569.220.352,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan telah diterima

pengembalian sebesar Rp781.882.661,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), sedangkan 5 (lima) Pemeriksaan Untuk Tujuan Tertentu (PUTT) masih dalam proses pelaksanaan.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.001.580.500,- dan terealisasi Rp742.188.011,- atau 74.10%, dengan realisasi kegiatan berupa:

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- (2) Pendampingan dan Asistensi.

Dari keseluruhan program teknis tersebut mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dan tujuan. Adapun keseluruhan capaian indikator kinerja sasaran dan tujuan tampak pada tabel T-C.30 berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Tegal

No	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	5	6	7	7	9	10	11	12	13
Indikator dan Target Perubahan Renstra 2021-2024											
Tujuan											
Opini BPK				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
Sasaran											
1	Nilai Maturitas SPIP			3,100	3.100			3.00	3.00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	92,00	92			91.58	92.28		
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	100,00	100			60	100		

No	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	70,00	80			71.25	56.59		
			Jumlah laporan hasil Audit, Monitoring, Reviu, Evaluasi, consalting dan pengawasan lainnya	96 laporan	96 laporan			150	213		
			Jumlah laporan kasus/khusus	48 Kasus /Khusus	48 Kasus /Khusus			41 Kasus /Khusus	44 Kasus /Khusus		
2	Level Kapabilitas APIP			3 DC (1 elemen)	3 Penuh			3 Penuh	3 Penuh		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									
			Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	8,30	12.5			8.3	12.5		
			Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	70,00	90			90	93.15		
			Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	90	100			95	100		

No	Indikator	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Jmlh kebijakan teknis	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	2 dokumen		
			Terlayannya permintaan pendampingan & Asistensi	100%	100%			100%	100%		

**** Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 adalah **Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indikator **Opini BPK**, yang merupakan indikator dari salah satu sasaran tujuan pembangunan daerah, Kabupaten Tegal telah memperoleh opini WTP 8 (delapan) kali berturut-turut atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tegal dari Tahun 2016 sampai Tahun 2023.

Opini Wajar Tanpa pengecualian (disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan, jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Capaian Indikator kinerja pada sasaran “Meningkatnya nilai maturitas SPIP” tahun 2024 berdasarkan Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan BPKP Provinsi Jawa Tengah dapat dikategorikan telah tercapai dengan baik. Penilaian ini dapat dicermati dari capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal pada indikator Nilai Maturitas SPIP yang mencapai 97.61% dari target Nilai Maturitas SPIP 3.1 tercapai Nilai 3.026.

Realisasi Capaian indikator Kinerja pada sasaran “Meningkatnya nilai kapabilitas APIP” dengan Indikator Level kapabilitas APIP pada tahun 2024, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2024 berada pada Level 3 dengan skor 3,00. menyandang predikat yang sama yaitu Level 3 (Integrated).

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adanya interaksi dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat berdampak terhadap situasi dan kondisi yang sangat kompleks, sehingga dapat berpengaruh positif maupun negatif bagi munculnya berbagai isu, permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik akan akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Pada prinsipnya isu-isu strategis dibidang pengawasan, bisa berupa hal- hal yang sarat masalah dan/atau merupakan potensi yang bersinggungan dengan aktivitas pengawasan. Baik masalah maupun potensi keduanya membutuhkan penanganan. Sebab jika berupa masalah tidak segera diatasi, akan memperburuk keadaan. Demikian pula sebaliknya, jika ternyata isu itu merupakan potensi, maka perlu ada sentuhan agar dapat memberikan nilai manfaat. Berkaitan dengan isu-isu strategis yang menyangkut penyelenggaraan tugas pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Kapabilitas APIP

Isu terkait dengan perubahan paradigma APIP dari *watch dog* menjadi *quality assurance* dan *consulting partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *consulting partner*. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada perangkat daerah sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tersebut, terumuskan dalam tabel pada halaman berikut.

Tabel 2.1
Perbedaan Paradigma Lama dan
Paradigma Baru

No	Uraian	Lama	Baru	
			Konsultan	Katalisator
1	Peran	<i>Watchdog</i>	Dapat memberikan <i>advice</i> dalam pengelolaan sumberdaya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara ekonomis, efisien dan efektif	Berkaitan dengan <i>quality assurance</i> yang bertujuan membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa kegiatan organisasi yang dijalankan telah menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan customer
2	Audit yang Dilaksanakan	<i>Compliance Audit</i> (Audit Kepatuhan)	<i>Performance Audit</i>	<i>Risk based audit</i>
3	Tujuan Audit	Memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan	Meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumberdaya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi	Memberikan panduan bagi manajemen untuk dapat mengenali risiko yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan organisasi
4	Sifat Rekomendasi	Perbaikan jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang

Saat ini SDM yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tegal masih belum memadai, baik secara kualitas maupun jumlahnya. Kondisi ini tidak seiring dengan tuntutan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan serta tugas mandatori yang semakin banyak dan membutuhkan dukungan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan. Menyikapi kondisi yang demikian, Inspektorat Kabupaten Tegal tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas hasil pengawasan, dengan menjalankan Kendali Mutu maupun SOP yang dimiliki, meskipun disadari dalam penerapannya belum optimal.

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Selain kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* (penjaminan mutu), Inspektorat Kabupaten Tegal juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang dari hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten hal ini mengindikasikan bahwa SPIP belum diterapkan secara efektif. Kondisi ini menuntut kiprah Inspektorat Kabupaten Tegal untuk membangun SPIP yang efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Muara dari SPIP ini adalah manajemen risiko yang akan menjadi prioritas penanganan, seiring dengan makin pentingnya manajemen risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Selain itu, pengembangan Pembangunan Budaya Integritas (PBI) juga akan terus didorong mengingat peran integritas yang cukup besar dalam upaya pengendalian intern. Pada kurun waktu periode Tahun 2019-2024 Inspektorat Kabupaten Tegal secara intens menggalakkan PBI, khususnya bermitra dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Saber Pungli Kabupaten Tegal. Mendatang PBI ditetapkan menjadi fokus kegiatan pengawasan di Kabupaten Tegal. Kegiatan PBI yang kontinyu dan konsisten diyakini akan membantu memastikan rencana aksi dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi lebih optimal.

Tabel 2.2

Identifikasi Permasalahan Inspektorat Kabupaten Tegal

No	Masalah Pokok (masalah tujuan sasaran)	Masalah	Akar Masalah
1	Tingkat Kedewasaan (maturitas) pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal b. Kegiatan pengawasan belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra 	<ul style="list-style-type: none"> a. Register risiko perlu disusun secara sistematis dan komprehensif b. Peran APIP dalam menjalankan peran layanan pemberian saran (<i>advisory services</i>) belum optimal c. Belum optimalnya penanganan kasus/pengaduan masyarakat <p>Kegiatan Pengawasan belum berfokus pada hasil 3E</p>
2	Level Kapabilitas APIP perlu ditingkatkan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan b. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) belum optimal digunakan dalam kegiatan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> a. APIP yang memilikisertifikasi keahlian belum banyak. b. Sistem Teknologi Informasi (TI) yang mendukung pengawasan belum terintegrasi. c. Kompetensi SDM dalam memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) perlu ditingkatkan.

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tegal yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Renstra Inspektorat serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Anggaran Belanja Inspektorat Kabupaten Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut

Rencana Anggaran Belanja Tahun 2026 terdiri dari 3 (tiga)

1. Program yaitu Program Penyelenggaran Pengawasan
terdiri dari 2 (dua) kegiatan 6 (enam) sub kegiatan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
Terdiri 2 (dua) kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan dan
3. Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
Terdiri 7 (tujuh) kegiatan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan,
Semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah dicantumkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 sebagaimana dalam tabel T-C.31:

LAMPIRAN T-C.31
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Tegal

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab Tegal				2.560.000.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab Tegal				2.560.000.000	
		Kab Tegal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase	93			Kab Tegal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Perse ntase	93		
		Kab Tegal	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel	Persentase	90			Kab Tegal	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel	Perse ntase	90		
		Kab Tegal	Persentase Desa Menyajikan	Persentase	20			Kab Tegal	Persentase Desa Menyajikan	Perse ntase	20		

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Laporan Keuangan secara Akuntabel						Laporan Keuangan secara Akuntabel				
		Kab Tegal	Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase	90			Kab Tegal	Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Perse ntase	90		
1.	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>Kab Tegal</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>laporan</i>	213	1,860.000.000	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>Kab Tegal</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>laporan</i>	213	1,860.000.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Tegal	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	laporan	59	50.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Tegal	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	laporan	59	50.000.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Tegal	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah	laporan	50	135.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Tegal	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah	laporan	50	135.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			daerah						daerah				
	Reviu Laporan Kinerja	Kab Tegal	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	laporan	16	50.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab Tegal	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	lapor an	16	50.000.000	
	Pengawasan Desa	Kab Tegal	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	laporan	50 (P3D) 34(A KD)	1.500.000.000	Pengawasan Desa	Kab Tegal	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	lapor an	50 (P3D) 34(AKD)	1.500.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Tegal	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokume n	4	125.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Tegal	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	doku men	4	125.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	Kab Tegal	<i>Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan tertentu</i>	<i>Persentase</i>	85%	700.000.000	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	Kab Tegal	<i>Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan tertentu</i>	<i>Persentase</i>	85%	700.000.000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab Tegal	Jumlah penanganan pengaduan dan TPTGR	Laporan	28	700.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab Tegal	Jumlah penanganan pengaduan dan TPTGR	Laporan	28	700.000.000	
II.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab Tegal	Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi		100	1.095.000.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab Tegal	Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi		100	1.095.000.000	
1.	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	Kab Tegal	<i>Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di</i>	<i>Persentase</i>	100	195.000.000	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	Kab Tegal	<i>Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di</i>	<i>Persentase</i>	100	195.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>dan Fasilitasi Pengawasan</i>		<i>Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>				<i>dan Fasilitasi Pengawasan</i>		<i>Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab Tegal	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan	Rekome n dasi	2	75.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab Tegal	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan	Reko menda si	2	75.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab Tegal	Jumlah kegiatan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Rekome n dasi	1	120.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab Tegal	Jumlah kegiatan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Reko menda si	1	120.000.000	
2.	Pendampingan dan asistensi	Kab Tegal	Persentase pelaksanaan pendampingan	<i>Persentase</i>	100	900.000.000	Pendampingan dan asistensi	Kab Tegal	Persentase pelaksanaan pendamping	<i>Perse ntase</i>	100	900.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan asistensi						an dan asistensi				
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tegal	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	48	200.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tegal	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	48	200.000.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	13	290.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Tegal	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	13	290.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	29	400.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Tegal	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiat an	29	400.000.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangka t daerah	48	10.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Tegal	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Peran gkat daerah	48	10.000.000	
III	Program penunjang urusan pemerintah		Persentase pelaksanaan penunjang urusan	Persenta sa	100	9.610.000.000	Program penunjang urusan pemerintah	Kab Tegal	Persentase pelaksanaan penunjang urusan	Perse ntase	100	9.610.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	n daerah kabupaten/kota		pemerintahan daerah kabupaten/kota				n daerah kabupaten/kota		pemerintahan daerah kabupaten/kota				
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	Persentase	100	90.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tegal	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja PD		100	90.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	11	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tegal	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	11	75.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	15	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kab Tegal	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	15	15.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase</i>	<i>100</i>	<i>4.585.000.000</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kab Tegal</i>	<i>Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>100</i>	<i>4.585.000.000</i>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah ASN yang menerima Gaji dan	ASN	58	4.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab Tegal	Jumlah ASN yang menerima	ASN	58	4.500.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ASN		Tunjangan				ASN		Gaji dan Tunjangan				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	dokumen	12	85.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Tegal	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	dokumen	12	85.000.000	
3.	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase	50	1.500.000.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Kab Tegal	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase	50	1.500.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Pegawai	50	1.500.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Tegal	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan	Pegawai	50	1.500.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									fungsi				
4	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase</i>	100	970.000.000	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Kab Tegal			100	970.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	1	70.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tegal		Paket	1	70.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tegal	Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	100.000.000	
	Penyediaan		Jumlah paket	Paket	1	50.000.000	Penyediaan	Kab	Jumlah paket	Paket	1	500.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Peralatan Rumah Tangga		perlatan rumah tangga				Peralatan Rumah Tangga	Tegal	perlatan rumah tangga				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor	Paket	1	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tegal	Jumlah paket bahan logistik kantor	Paket	1	200.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang yang di cetak dan jumlah lembar penggandaan	Paket	1	100.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Tegal	Jumlah paket barang yang di cetak dan jumlah lembar penggandaan	Paket	1	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan	Dokume n	12	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab Tegal	Jumlah dokumen bahan bacaan	Doku men	12	50.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan rapat penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	60	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tegal	Jumlah laporan rapat penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	60	400.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	1.105.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tegal	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1.105.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	unit	10	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tegal	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	unit	10	200.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau		Jumlah unit Gedung atau bangunan	unit	1	200.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau	Kab Tegal	Jumlah unit Gedung atau bangunan	unit	1	200.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Bangunan Lainnya		lainnya yang disediakan				Bangunan Lainnya		lainnya yang disediakan				
	Pengadaan kendaraan Dinas		Jumlah unit kendaraan Dinas yang disediakan	Unit	-	705.000.000	Pengadaan kendaraan Dinas	Kab Tegal	Jumlah unit kendaraan Dinas yang disediakan	Unit	-	705.000.000	
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentas e	100	560.000.000	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kab Tegal	<i>Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persen tase	100	560.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Laporan	12	350.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tegal	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lapor an	12	350.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor	laporan	12	200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tegal	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor	lapora n	12	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tegal			12	10.000.000	
7.	<i>Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah</i>		<i>Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentas e	100	800.000.000	<i>Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah</i>	Kab Tegal	<i>Persentase pelaksanaan Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah</i>		100	800.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan		Jumlah kendaraan perorangan	unit	29	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa	Kab Tegal	Jumlah kendaraan perorangan		29	400.000.000	

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satua n	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya				n, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	90	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tegal	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		90	100.000.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tegal	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		2	300.000.000	
												13.265.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten / Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional

Dalam rangka memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 2 (dua) tahun dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, terlebih dahulu disederhanakan dalam pentahapan pembangunan setiap tahun. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD.

Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan unsur pengawasan urusan pemerintahan di Bidang Inspektorat Daerah. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) dalam 2 (dua) tahun ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Inspektorat Kabupaten Tegal mengacu pada tema Pembangunan dengan mengutamakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan yaitu dengan berbagai Diklat, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kantor Sendiri serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas pemulihan ekonomi pasca pandemi. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 mendukung arah kebijakan ini dengan berbagai program dan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Tak hanya itu, pelaksanaan Program Kerja Inspektorat juga mendukung 10 Program Unggulan Bupati..

3.1.1 Telaahan Renstra BPKP 2020-2024

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2020-2024 melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2020-2024. Visi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tersebut adalah “Menjadi Auditor Internal Pemerintah berkelas dunia dan *Trused Advisor* Pemerintah untuk meningkatkan *Good Governance Sektor public* dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan wakil presiden Indonesia yang maju, berdaulat mandiri berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 2 misi yang akan dijalankan oleh BPKP, yaitu :

- a. Melaksanakan pengawasan Intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional
- b. Membangun sumber daya yang berkualitas

Kemudian dalam menyelenggarakan misinya, BPKP menetapkan dua tujuan dan enam sasaran, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

No.	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah
		Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional
		Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha
		Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektifitas Pengendalian Korupsi

		Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang unggul, akuntabel dan sehat.	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas

Mencermati rumusan tujuan dan sasaran BPKP tersebut, terdapat benang merah yang menggambarkan hubungan yang kuat dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, yakni menyelenggarakan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPKP Tahun 2020-2024, dan secara berjenjang juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional.

3.1.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Tahun 2024-2026 adalah "Terwujudnya Penguatan Pengawasan Intern dalam Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik". Atas tujuan tersebut ada 2 sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- a. Tercapainya Level 3 penuh Kapabilitas APIP;
- b. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP;

Mencermati tujuan dan sasaran tersebut, melalui pengawasan Intern dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki kontribusi dan peran serta dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, dan secara berjenjang berkontribusi pula terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah.

Karenanya, dalam sub bab ini tidak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Penguatan pengawasan merupakan bagian integral dari 8 (delapan) area perubahan dari agenda percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terbingkai dalam Grand Design Reformasi Birokrasi. Secara utuh 8 (delapan) area perubahan dimaksud mencakup :

a. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan agar secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Efektivitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh

tingkatan pemerintahan serta efektivitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan Ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing perangkat daerah. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan system rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standard kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan Pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan menurunnya

tingkat penyalahgunaan wewenang dari pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan system manajemen kinerja dan penyusunan indicator kinerja utama (IKU).

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tegal pada Rencana Strategis Tahun 2025-2026 adalah: **“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah”**. Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan 2 tahun mendatang adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan melalui sistem e-audit.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Tegal, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran untuk Rancangan Awal renja tahun 2026 adalah:

- a. Tercapainya Nilai 3,06 Maturitas SPIP
- b. Tercapainya Level 3 Kapabilitas APIP;

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tegal

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Target Capaian		Kondisi Akhir
					2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Nilai		3,050	3,060	3,060
	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level		3	3	3

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Tegal telah menyusun rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Tegal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasanyang transparan	Pengintegrasian sistem informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi	
		Optimalisasi manajemen risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern		
		Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas		
	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada OPD		Pengintegrasian sistem informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi
		Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan		
		Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasanyang transparan.		

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Anggaran Belanja Tahun 2026, sebesar Rp. 13.265.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari 3 (tiga) Program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan; kemudian yang kedua adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi yang terdiri dari 2 (dua) +penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah dicantumkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026. Adapun alokasi dana di setiap program dan kegiatan dapat di lihat secara sederhana sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp 9.610.000.000
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 90.000.000,00
b. Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp 4.585.000.000,00
c. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 1.500.000.000,00
d. Administrasi umum perangkat Daerah	Rp 970.000.000,00
e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 1.105.000.000,00
f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 560.000.000,00
g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 800.000.000,00
2. Program penyelenggaraan pengawasan	Rp 2.560.000.000,00
a. Penyelenggaraan pengawasan Internal	Rp 1.860.000.000,00
b. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Rp 700.000.000,00
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Rp 1.095.000.000,00
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	Rp 195.000.000,00
b. Pendampingan dan Asistensi	Rp 900.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Secara lebih spesifik, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dapat digunakan sebagai sarana mengukur keberhasilan kinerja dari eselon II. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dituju.

Dalam RPD Kabupaten Tegal 2025-2026 terdapat misi yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal, yaitu Misi kesatu “mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat”. Untuk melaksanakan misi tersebut terdapat 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang akan dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang diejawantahkan melalui pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan program penunjang 2 (dua) program utama, yang terepresentasikan dalam 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, berikut indikator kinerja dan target capaiannya serta besarnya dukungan anggaran untuk berkontribusi mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tegal 1 (satu) tahun mendatang dapat dicermati dalam tabel T-C.33 berikut :

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Tegal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Kab Tegal	93	2.590.000.000		93	2.590.000.000
		Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel	Kab Tegal	90			90	
		Persentase Desa Menyajikan Laporan Keuangan secara Akuntabel	Kab Tegal	20			20	
		Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Tegal	90%			90%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab Tegal	213	1,860.000.000		213	1,860.000.000
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Kab Tegal	59	50.000.000		59	50.000.000
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Kab Tegal	50	135.000.000		50	135.000.000
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Kab Tegal	16	50.000.000		16	50.000.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Kab Tegal	50 (P3D) 34(AKD)	1.500.000.000		50 (P3D) 34(AKD)	1.500.000.000
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Tegal	4	125.000.000		4	125.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan tertentu	Kab Tegal	85%	700.000.000		85%	700.000.000
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penanganan pengaduan dan TPTGR	Kab Tegal					
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi	Kab Tegal	100	1.095.000.000		100	1.095.000.000
6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab Tegal	100	195.000.000		100	195.000.000
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan	Kab Tegal	2	75.000.000		2	75.000.000
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	Jumlah kegiatan kebijakan teknis di bidang fasilitasi	Kab Tegal	1	120.000.000		1	120.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengawasan	pengawasan						
6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi	Kab Tegal	100	900.000.000		100	900.000.000
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Kab Tegal	48	200.000.000		48	200.000.000
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Tegal	13	290.000.000		13	290.000.000
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kab Tegal	29	400.000.000		29	400.000.000
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi	Kab Tegal	48	10.000.000		48	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	Integritas	dan verifikasi penegakan integritas						
6.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab Tegal	100	9.610.000.000		100	9.610.000.000
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	Kab Tegal	100	90.000.000		100	90.000.000
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kab Tegal	11	75.000.000		11	75.000.000
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab Tegal	15	15.000.000		15	15.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kinerja SKPD						
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tegal	100	4.585.000.000		100	4.585.000.000
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Kab Tegal	58	4.500.000.000		58	4.500.000.000
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Kab Tegal	12	85.000.000		12	85.000.000
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Tegal	100	1.500.000.000		100	1.500.000.000
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab Tegal	50	1.500.000.000		50	1.500.000.000
			Kab Tegal					
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Kab Tegal	100	970.000.000		100	970.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Umum Perangkat Daerah	Perangkat Daerah						
6.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Tegal	1	70.000.000		1	70.000.000
6.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor	Kab Tegal	1	100.000.000		1	100.000.000
6.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket perlatan rumah tangga	Kab Tegal	1	50.000.000		1	50.000.000
6.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Kab Tegal	1	200.000.000		1	200.000.000
6.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang yang di cetak dan jumlah lembar penggandaan	Kab Tegal	1	100.000.000		1	100.000.000
6.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan	Kab Tegal	12	50.000.000		12	50.000.000
6.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kab Tegal	60	400.000.000		60	400.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tegal	100	1.105.000.000		100	1.105.000.000
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	Kab Tegal	10	200.000.000		10	200.000.000
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab Tegal	1	200.000.000		1	200.000.000
6.01.01.2.07.0009	Pengadaan kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan Dinas yang disediakan	Kab Tegal	-	705.000.000		3	705.000.000
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tegal					
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab Tegal	12	350.000.000		12	350.000.000
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor	Kab Tegal	12	200.000.000		12	200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab Tegal	12	10.000.000		12	10.000.000
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tegal	100	800.000.000		100	800.000.000
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Kab Tegal	29	400.000.000		29	400.000.000
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kab Tegal	90	100.000.000		90	100.000.000
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kab Tegal	2	300.000.000		2	300.000.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2026 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif, sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), guna terselenggaranya tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Karena Rancangan Awal Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan yang skala prioritasnya lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Rancangan Awal Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra, dengan menyesuaikan struktur susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Tegal tentu tidak dapat melakukannya sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami, kiranya dokumen Rancangan Awal Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Tegal. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal yang akan datang.

Slawi, 06 Januari 2025

Inspektur



SAIDNO, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720713 199311 1 001